

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- _____, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005).
- _____, Bagir Manan, dkk, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan, 2006).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemilihan Kepala Daerah, (Jakarta: BPHN, 2011).
- Gaffar, Janedjri M., Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Surakarta: 17 Oktober 2009).
- Gultom, Dr. Loedwijk, S.H.,M.H., *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia (Suatu Kajian dari Aspek Tugas dan Wewenangnya)*, (Bangung: CV. UTOMO, 2007).
- Henk Schulte Nordholt, (ed.), Ireen Hoogenboom (ast.ed.), Indonesian in Transition, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Joeniarto, Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hukum Tata Negara yang Tertinggi, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1982).
- Manan, Bagir, Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997).
- Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: PSH UII, 2005).
- Marsudi, Subandi Al, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).
- Moleong, Lexy J, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002).
- Munir, Badrul, Perencanaan daerah Dalam Perspektif Otoda, (Mataram: Bappeda, 2002), hlm. 28.

Rasyid Thalib, Abdul, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Riyanto Astim, Teori Konstitusi, (Bandung: YAPEMDO, 2000).

Rienov Robert, *Introduction to Government*, (New York: Alfred-A.Knopf, 1964).

S., Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

_____, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

Sakti, Hadiwijoyo Suryo, Gubernur, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011).

Saragih Bintang Regen, Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar Negara di Indonesia, (Bandung: CV Utomo, 2006).

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1989).

_____, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Pres, 1983).

Siahaan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Soemitro, Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Strong C.F., Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, (Bandung: Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, 2004).

Thaib Dahlan, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

B. Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis, dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

C. Jurnal

Nanang Sri Darmadi, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II, Nomor 2, Mei-Agustus 2015.

D. Makalah yang dipublikasi

Bagir Manan, Tugas Sosial Pemerintahan Daerah, Pikiran Rakyat, (28 November 2008).

Eko Noer Kristiyanto, Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Jurnal Rechtsvinding, Vol. I, No. 3, 2012.

Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan,

PT. Sumber Agung, Jakarta, 2006.

E. Internet

<http://www.hukumonline.com> (diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 21.00 WIB)

[http://tehangatsekali.blogspot.co.id/2011/11/tata-perundangan-menurut - uu-no12-tahun.html](http://tehangatsekali.blogspot.co.id/2011/11/tata-perundangan-menurut-uu-no12-tahun.html) (diakses pada 16 Oktober 2017 pukul 19.54 WIB)

<http://www.pandjionline.wordpress.com> (diakses pada 30 Oktober 2017 pukul 13.01 wib)